BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Profil Umum Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, bahwa tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional *regional*, dan *sektoral* dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan menyelenggarakan fungsi-fungsi diantaranya, merumuskan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan, sedangkan di Propinsi dan kabupaten/ kota sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi serta Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang merupakan instansi *vertikal* Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan tugas di bidang pertanahan KANWIL BPN Propinsi Jawa Barat, berpedoman pada rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional R.I, sehingga program-program yang direncanakan dan dilaksanakan KANWIL BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPN R.I. Dalam rangka penyusunan perencanaan dan program kerja, khususnya di tingkat Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, diperlukan data-data serta informasi keadaan wilayah Propinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan bidang tugas pertanahan, agar program kerja yang ditetapkan dapat benar-benar mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Faktor lain yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program kerja BPN, khususnya KANWIL BPN Propinsi Jawa Barat adalah ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Profil BPN Propinsi Jawa Barat, menyajikan data yang berkaitan dengan bidang tugas pertanahan, gambaran umum keadaan fisik wilayah Propinsi Jawa Barat, keadaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki oleh KANWIL BPN Propinsi Jawa Barat. Dengan disusunnya Profil BPN Propinsi

Jawa Barat diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional baik di tingkat nasional, *regional*, maupun *sektoral*. Sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan [4].

2.1.1 Arti Lambang/Logo

Lambang Badan Pertanahan Nasional adalah bentuk suatu kesatuan gambar dan tulisan. Lambang/logo Badan Pertanahan Nasional dapat dilihat pada gambar 2.1 [1]



Gambar 2. 1 Lambang/Logo BPN [1]

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI No 59 Tahun 2008 tentang Lambang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia seperti gambar 2.1 yang memiliki arti sebagai berikut :

1.  Gambar **4 (empat) butir padi** melambangkan Kemakmuran dan kesejahteraan. Memaknai atau melambangkan 4 (empat) tujuan Penataan Pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI yaitu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan.
2.  Gambar **lingkaran bumi** melambangkan sumber penghidupan manusia. Melambangkan wadah atau area untuk berkarya bagi BPN RI yang berhubungan langsung dengan unsur-unsur yang ada didalam bumi yang meliputi tanah, air dan udara.

3.  Gambar **sumbu** melambangkan poros keseimbangan. **3 (tiga) Garis Lintang** dan **3 (tiga) Garis Bujur** Memaknai atau melambangkan pasal 33 ayat 3 UUD 45 yang mandasari lahirnya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960.
4.  Gambar **11(sebelas) bidang** grafis bumi memaknai atau melambangkan 11 (Sebelas) agenda pertanahan yang akan dan telah dilakukan BPN RI. Bidang pada sisi sebelah kiri melambangkan bidang bumi yang berada diluar jangkauan wilayah kerja BPN RI.
5. **Warna Coklat** melambangkan bumi, alam raya dan cerminan dapat dipercaya dan teguh.
6. **Warna Kuning Emas** melambangkan kehangatan, pencerahan, intelektual dan kemakmuran.
7. **Warna Abu-abu** melambangkan kebijaksanaan, kedewasaan serta keseimbangan.

2.1.2 VISI DAN MISI

Visi merupakan sudut pandang, tujuan dari sebuah perusahaan dan misi adalah pernyataan tentang apa yang dikerjakan oleh suatu perusahaan untuk mewujudkan visinya. Visi dan misi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut :

a. VISI:

Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

b. MISI:

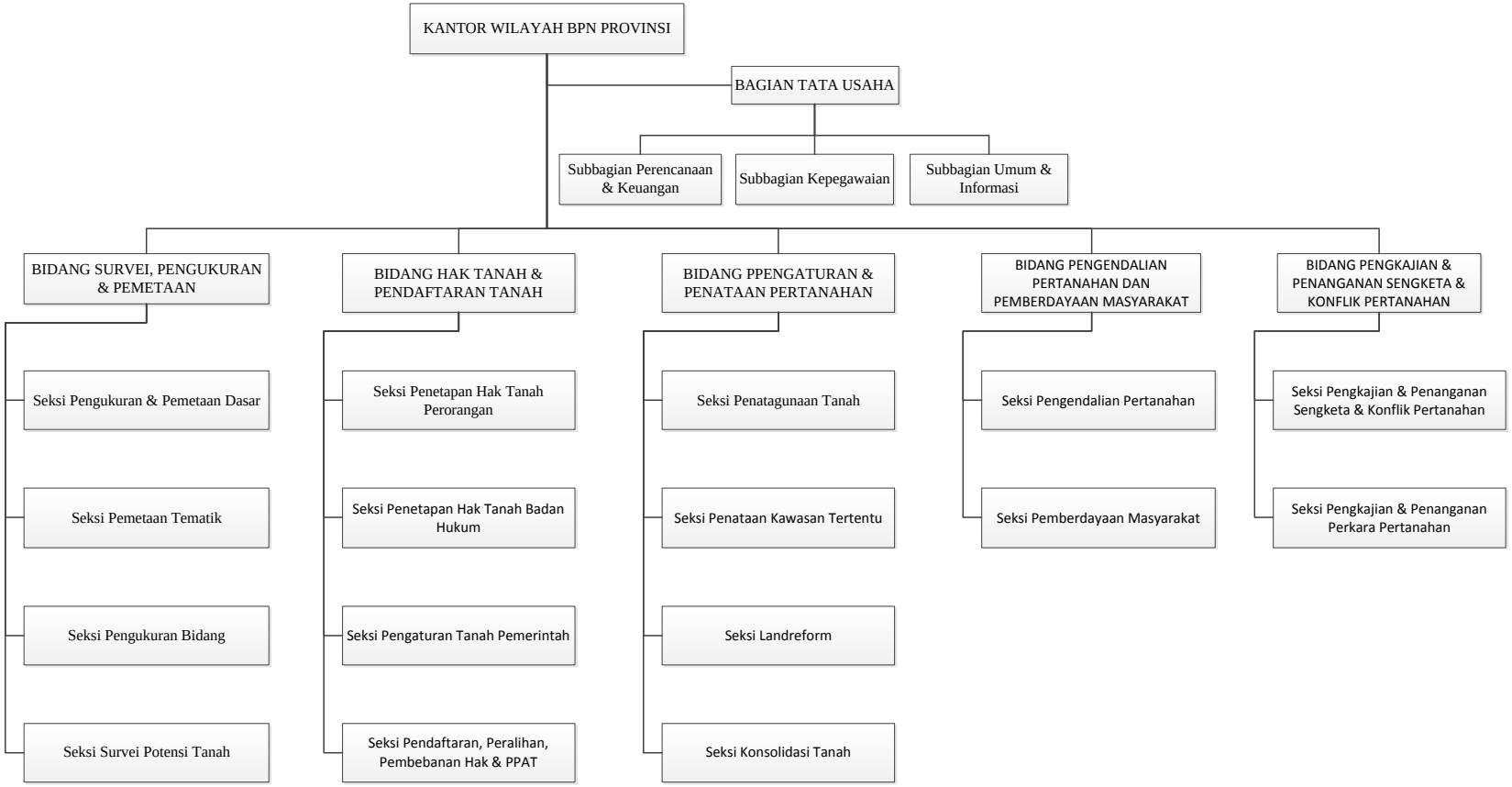
Mengembangkan dan menyelenggarakan politik dan kebijakan pertanahan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan.
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa, konflik dan perkara di kemudian hari.
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
5. Menguatkan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat, prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi rakyat secara luas [1].

2.1.3 Struktur Organisasi KANWIL BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan

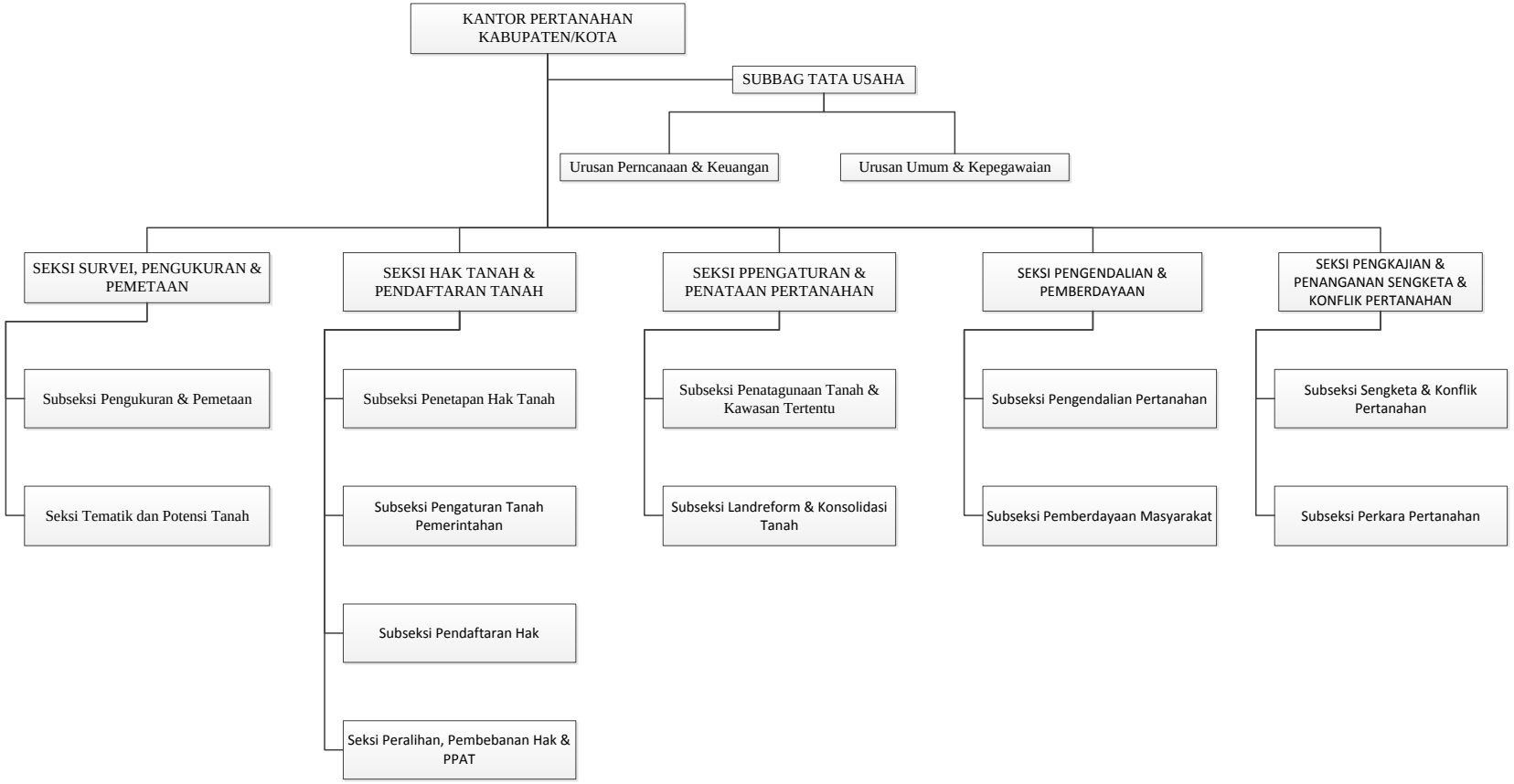
Berdasarkan Peraturan Ka. BPN No. 4 Tahun 2006 ditetapkan struktur organisasi KANWIL BPN Propinsi dan struktur organisasi kantor Pertanahan seperti pada gambar 2.2 Struktur Organisasi KANWIL BPN Propinsi dan gambar 2.3 struktur organisasi kantor Pertanahan.

Struktur Organisasi KANWIL BPN Propinsi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi KANWIL BPN Propinsi [4]

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN



Gambar 2. 3 Stuktur Organisasi Kantor Pertanahan [4]

Deskripsi kerja pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Bidang PPP maka dapat diketahui bahwa Menteri Keuangan / Kementerian Keuangan Deskripsi Kerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Deskripsi Kerja Pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar JABAR

No	Jabatan	Tugas
1.	Menteri Keuangan / Kementerian Keuangan	1. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang membidangi urusan keuangan yang dipimpin oleh seorang Menteri. 2. Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik Negara, artinya Menteri Keuangan adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Negara / daerah.
2.	Kepala / Pemimpin BPN	1. Kepala / Pemimpin BPN memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. 2. Kepala BPN mempunyai tugas memimpin BPN dalam menjalankan tugas dan fungsi BPN.
3.	Tata Usaha Subbagian Urusan Perencanaan dan Keuangan	Tata Usaha Subbagian Urusan Perencanaan dan Keuangan bertugas menyiapkan penyusunan rencana, program dan anggaran serta laporan kinerja pemerintah, keuangan dan penyiapan bahan evaluasi.
4.	Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP)	1. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP) tanggung jawab langsung kepada Kepala / Pemimpin BPN. 2. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP) mempunyai tugas memimpin, mengawasi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP).
5.	Bendahara Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan	Bendahara Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan bertugas penyusunan rencana kegiatan pada bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (PPP), membuat Petunjuk Operasional Kegitan (POK), membuat laporan akhir, membuat laporan

No	Jabatan	Tugas
		triwulan dan mengatur urusan keuangan pada Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
6.	Kepala Daerah	Kepala Daerah bertugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
7.	Admin	Admin Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan bertugas mengelola data pengguna.

2.1.4 Fungsi

BPN melaksanakan tugas – tugasnya dengan cara menyelenggarakan fungsi yaitu [1] :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan.
3. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
4. Pembinaan dan pelayanan Administrasi umum di bidang pertanahan.
5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan.
6. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum.
7. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah.
8. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus.
9. Penyiapan Administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan.
10. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah.
11. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan.
13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.
14. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan.

15. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan.
16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.
17. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.
18. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
19. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
20. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5 Agenda Kebijakan

BPN melaksanakan tugas – tugasnya dengan cara menyelenggarakan agenda kebijakan seperti berikut [1] :

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (*land tenureship*).
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun *database* pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori yang berkaitan dengan pembangunan perangkat lunak Sistem Monitoring Penggunaan Dana Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) bidang Pengaturan dan Penataan Pertahanan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat.

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

Konsep dasar sistem informasi mendefinisikan sistem menjadi dua kelompok pendekatan sistem, yaitu sistem yang lebih menekankan pada prosedur dan elemennya. Menurut *Gerald. J* Prosedur didefinisikan sebagai suatu urut – urutan yang tepat dari tahapan – tahapan intruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan. Siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. *Davis* adalah penganut pendekatan elemen yang mendefinisikan sistem sebagai bagian – bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Sedangkan meurut *Lucas* sistem didefinisikan sebagai suatu komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung, satu sama lain dan terpadu. Sebuah sistem mempunyai tujuan atau sasaran [5].

2.2.1.1 Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah dan sasaran atau tujuan[5].

1. Komponen sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen - elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian - bagian dari sistem.

2. Batas Sistem

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga merugikan.

4. Penghubung Sistem

Penghubung merupakan media yang menghubungkan antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya yang memungkinkan sumber - sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya.

5. Masukan Sistem

Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (*maintenance input*) dan masukan sinyal (*signal input*).

6. Keluaran Sistem

Keluaran adalah energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain.

7. Pengolah Sistem

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran.

8. Sasaran Sistem

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran, jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran maka sistem tersebut tidak akan ada. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya karena sasaran sangat berpengaruh pada masukan dan keluaran yang dihasilkan [5].

2.2.1.2 Klasifikasi Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara suatu komponen dengan komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang ada didalam sistem tersebut [5].

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide – ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.
2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam tidak dibuat manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.
3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu *(deterministic system)* dan sistem tak tentu *(probabilistic system).* Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sistem tertentu relatif stabil/konstan dalam jangka waktu yang lama. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

2.2.2 Konsep Dasar Informasi

Menurut *Raymond McLeod*, informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Alat pengolah informasi dapat meliputi elemen komputer, elemen *non*-komputer atau kombinasinya [5].

Sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang menggambarkan kejadian – kejadian dan kesatuan nyata. Informasi diperoleh setelah data – data mentah dproses atau diolah. Menurut *John Burch* dan *Gary*

Grudnitski, agar informasi dihasilkan lebih berharga, maka informasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Informasi harus akurat, sehingga mendukung pihak manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Informasi harus relevan, benar – benar terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan.
3. Informasi harus tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatan pada saat dibutuhkan.

Kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidak pastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Nilai sebuah informasi ditentukan dari dua hal yaitu manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut.

2.2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen – komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi. Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan – laporan yang diperlukan [5].

2.2.4 *Monitoring*

Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan/ program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program/ kegiatan itu selanjutnya. *Monitoring* adalah

pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran *(awareness)* tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. *Monitoring* akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan [6].

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. *Monitoring* menyediakan data mentah untuk menjawab pertanyaan sedangkan *evaluasi* adalah meletakkan data-data tersebut agar dapat digunakan dan dengan demikian memberikan nilai tambah. *Evaluasi* adalah tempat belajar kejadian, pertanyaan yang perlu dijawab, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa *monitoring*, evaluasi tidak akan ada dasar, tidak memiliki bahan baku untuk bekerja dengan, dan terbatas pada wilayah spekulasi. Oleh karena itu, *Monitoring* dan Evaluasi harus berjalan seiring karena pada dasarnya *monitoring* memiliki beberapa tujuan, yaitu : [7]

1. Mengkaji apakah kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan.
4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

2.2.5 *Dashboard*

Dashboard didesain untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan strateginya, yaitu mengukur proses yang telah berjalan, *memonitor* kinerja dan memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Secara umum dari berbagai pengertian *dashboard* mempunyai beberapa manfaat utama, yaitu : [8]

1. Mengkomunikasikan strategi, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mengkomunikasikan strategi dan tujuan yang dibuat oleh para pengambil keputusan kepada semua pihak dalam suatu organisasi sesuai dengan peran dan *level*nya.
2. Memonitor dan menyesuaikan pelaksanaan strategi, yaitu digunakan untuk mengindentifikasi permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya.
3. Menyampaikan wawasan dan informasi ke semua pihak, yaitu dengan menyajikan informasi secara sekilas menggunakan grafik, simbol, bahan dan berbagai bentuk lainnya yang memudahkan pengguna dalam memahami dan mempersepsi informasi secara benar.

Menurut *Wayne Eckerson* menyatakan bahwa *dashboard* dapat dikelempokan menjadi tiga bagian berdasarkan *level* manajemen yang didukung yaitu *operatioanal dashboard*, *tactical dashboard* dan *strategi dashboard* [8].

Strategi dashboard adalah bagian yang mendukung manajemen *level* strategis untuk memberikan informasi untuk membuat keputusan bisnis, memprediksi peluang, dan memberikan arahan pencapaian tujuan strategis. Fokus pada pengukuran kinerja *high-level* dan pencapaian tujuan strategis organisasi, mengadopsi konsep *balance score-card.* Informasi yang disajikan tidak terlalu detail dan tidak memerlukan data *real-time.*

Tactial dashboard, mendukung manajemen *level* taktikal yang digunakan untuk memberikan informasi yang dioerlukan oleh analisis untuk mengetahui penyebab suatu kejadian. Fokus pada proses analisis untuk menentukan penyebab dari suatu kondisi atau kejadian tertentu. Memikili *content* informasi yang lebih banyak, desain untuk berinteraksi dengan data seperti *drill-down* dan tidak memerlukan data *real-time.*

Operasional dashboard mendukung manajemen *level* operasional, yaitu memberikan informasi mengenai aktifitas yang sedang terjadi beserta perubahan secara *real-time* untuk memberikan kewaspadaan terhadap hal – hal yang perlu direspon secara cepat. Fokus pada *monitoring* aktifitas dan kejadian yang berubah secara konstan. Informasi disajikan sangat spesifik dan sangat detail, dinamis dan memerlukan data *real-time.*

2.2.6 Basis Data

Basis Data adalah himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Basis Data adalah kumpulan data yag saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan [9].

Perancangan proses sistem basis data dalam pembangunan program aplikasi Sistem Monitoring Penggunaan Data Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) menggunakan *tools Entity Relation Diagram (ERD). ERD* merupakan suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. *ERD* merupakan model jaringan data yang menekankan pada struktur – struktur dan *relationship* data. *ERD* digunakan oleh professional sistem untuk berkomunikasi dengan pemakai eksekutif tingkat tinggi dalam suatu organisasi. Diagram hubungan entitas atau E-R diagram adalah notasi grafik dari sebuah model data atau sebuah model jaringan yang menjelaskan tentang data yang terasimpan (*relationship* data) dalam sistem secara abstrak [5].

2.2.7 *Flowmap*

Flowmap adalah penggambaran secara grafik dari langkah – langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Flowmap berguna untuk membantu analis dan programer untuk memecahkan masalah kedalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif pengoperasian. Biasanya flowmap

mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu dipelajari dan dievaluasi lebih lanjut [10].

2.2.8 Diagram Aliran Data / *Data Flow Diagram* (DFD)

Diagram aliran data / *data flow diagram* (DFD) merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan DFD adalah memudahkan pemakai atau *user* yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan [5].

2.2.9 Kamus Data

Kamus data berfungsi membantu perilaku sistem untuk mengartikan aplikasi secara detail dan mengorganisasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem secara persis sehingga pemakai dan penganalisis sistem mempunyai dasar pengertian yang sama tentang masukan, keluaran, penyimpanan dan proses. Pada tahap analisis, kamus data digunakan sebagi alat komunikasi antara analisis sistem dengan pemakai sistem tentang data yang mengalir di sistem, yaitu tentang data yang masuk ke sistem dan tentang informasi yang dibutuhkan oleh pemakai sistem [5].